



# Warga Keluhkan KMS Dicabut

■ Tidak Lagi Masuk Sasaran 2023 ■ Pemkot Yogya Sebut Data Sudah Divalidasi

**YOGYA, TRIBUN** - Puluhan warga yang tidak lagi masuk dalam sasaran Kartu Menuju Sehat (KMS) menyambangi kantor DPRD Kota Yogya, Selasa (31/1). Mereka meminta kejelasan soal jaminan sosial yang tidak lagi didapat dan khawatir anak-anaknya kehilangan jalur afirmasi masuk sekolah negeri.

Salah satu perwakilan warga, Yogi Prasetyo, menyampaikan proses validasi KMS yang digulirkan Pemkot Yogya pada 2022 lalu dianggap tebang pilih dan tidak tepat sasaran. Padahal, di samping jaminan sosial, pemegang KMS selama ini juga mendapatkan "keistimewaan" berupa jalur khusus untuk akses sekolah negeri.

"Karena dilaporkan warga yang masuk ke kita ada yang memang benar-benar membutuhkan itu, tetapi malah tidak mendapatkan KMS. Berarti, tebang pilih juga untuk pendidikan dan sangat merugikan," urai warga Wirongnan, Kemantren Mergangsan itu.

Sebab, selaras aturan, kuota afirmasi yang tersedia untuk masuk sekolah negeri tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi KMS. Sehingga, ketika kepemilikan KMS-nya dicabut oleh eksekutif, mereka pun merasakan dilema karena peluang anaknya masuk sekolah negeri turut tergerus.

"Beda dengan tahun kemarin, non-KMS masih bisa mengurus JPD, hingga KJB. Sekarang tidak bisa lagi, semua berdasar KMS. Itu yang kami perjuangkan supaya ada senarai kelonggaran," katanya.

Hanya saja, lanjut Yogi, paparan dari eksekutif yang dalam kesempatan tersebut

## MENCARI KEJELASAN

- Puluhan warga yang tidak lagi masuk dalam sasaran KMS menyambangi kantor DPRD Kota Yogya, Selasa (31/1).
- Mereka meminta kejelasan soal jaminan sosial yang tidak lagi didapat.
- Warga khawatir anak-anaknya kehilangan jalur afirmasi masuk sekolah negeri.
- Pemkot menyebut data penerima sudah divalidasi dan sudah tetap.

diwakili Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogya, Agus Budi, belum memuaskannya. Keinginan warga untuk menjadikan DTKS sebagai tolak ukur masuk ke sekolah negeri dipastikan tak bisa terealisasi.

"Sejak awal harapan kami ketika warga yang tidak punya KMS tapi punya DTKS itu bisa sama masuk ke sekolah negeri lewat jalur afirmasi. Tapi, tadi sudah disebutkan, patokannya tetap KMS," keluhinya.

Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogya, Agus Budi, mengatakan, data KMS yang bersumber dari validasi sejak 2022 sudah ditetapkan. Bahkan, anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Yogya pun telah ditetapkan untuk periode setahun ke depan.

"Jadi, kami tidak bisa menambah. Tapi, kalau ada usulan yang dirasa itu tidak

tepat sasaran, kami bisa mencabutnya, setelah ada bukti yang kuat," ujarnya ketika menerima langsung audiensi dari warga.

Adapun Kalau yang dipermasalahkan soal jalur afirmasi untuk masuk sekolah negeri, sekarang sudah ada bantuan tunggakan pendidikan di Kota Yogya. Meski, warga tak mendapat KMS sekalipun.

Dia menjelaskan, di Kota Yogya saat ini terdapat 17.451 Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, sehingga perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah via KMS. Dari jumlah tersebut, jika dirinci lebih lanjut, 14.986 merupakan rentan miskin dan 2.465 di antaranya ialah keluarga miskin.

"Jumlahnya memang meningkat, karena tahun lalu itu ada sekitar 15 ribu sasaran. Tapi, keluarga fakir miskin sudah tidak ada. Pembagian kartu juga sudah, sudah sejak satu minggu kemarin, pertengahan Januari," urainya.

Oleh sebab itu, pihaknya pun menegaskan tidak bisa mengulirkan survei ulang, seperti desakan beberapa warga yang tidak lagi terakup dalam KMS di periode 2023 ini. Sejak 2022 lalu, Dinsosakertrans sudah mendarang 55.019 KK untuk melangsungkan validasi calon penerima kartu menuju sejahtera.

"Tidak mungkin (survei ulang) Semua sudah kami datangi. Jadi, semua yang masuk di aplikasi (daftar penerima KMS) ada tandatangan. Kalau tidak ketemu orangnya, yang tanda tangan harus RT-nya," pungkasnya. (aka)



**AUDIENSI** - Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Suryani (kanan) saat menemui audiensi warga yang status kepemilikan KMS-nya dicabut, Selasa (31/1). Warga yang tak lagi menerima KMS mempertanyakan data kepada Pemkot Yogya.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005